



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 902/Kep.16-Huk/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
902/Kep.376-Huk/2021 TENTANG PEJABAT YANG MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Nomor 900/ -BPKAD/2022 perihal usulan perubahan Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.376-Huk/2021 tentang Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.376-Huk/2021 tentang Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2022

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR : 902/Kep.16-Huk/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
 WALIKOTA NOMOR 902/Kep.376-Huk/2021 TENTANG
 PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2022

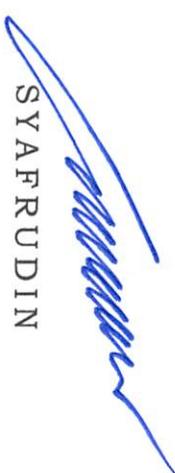
NO	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
		NAMA/NIP PEJABAT	JABATAN DAN TUGAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA/NIP PEJABAT	JABATAN DAN TUGAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	MOKHAMMAD TOHIR, S.Sos, M.Si NIP. 19680907 199304 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan.
		-	-	MARTA Satria Subing, SH NIP. 19860310 201101 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum.
		-	-	MULANI,S.Ag NIP. 19730410 200212 1 009	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat.
		-	-	TINA SURYANINGSIH,S.Pd.M.Pd NIP. 19781018 200604 2 011	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan.
		-	-	EKA SURYA MIHARJA,ST,MM NIP. 19780927 201001 1 008	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
		-	-	EVI INDAH YANI ,SE.M.Si NIP. 19810211 200502 2 006	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

			-	REVANI GENA AZZUNAIKA,S.STP NIP. 19940606 201708 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum.
			-	WATI SUMIYATI NIP. 19760911 201507 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			-	LENI MARLINAH NIP. 19820216 201001 2 007	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi.
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		-	IBRA GHOLIBI, ST NIP 19791129 200902 1 002	- Kuasa Pengguna Anggaran. - Pejabat Penandatanganan SPJ Bidang Bina Marga. - Pejabat Penandatanganan SPJ Bidang Sekretariat.
			-	IPHAN FUAD, ST, M.Si NIP. 19760323 200212 1 006	- Kuasa Pengguna Anggaran. - Pejabat Penandatanganan SPJ Bidang Cipta Karya.
			-	ARIE ANWAR MALINTANG,AKS NIP. 19651012 199703 1 004	- Kuasa Pengguna Anggaran. - Pejabat Penandatanganan SPJ Bidang SDA.
			-	Tb. ACHMAD BAJURI, ST NIP. 19670429 200112 1 001	- Kuasa.Pengguna Anggaran. - Pejabat Penandatanganan SPJ Bidang Penataan Ruang.
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	DESI VIRATINIA, SE, MM NIP. 198409042010012009	- Kuasa PPKD/BUD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) - Pejabat yang menerbitkan dan menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) - Menyiapkan Anggaran Kas	DESI VIRATINIA, SE., MM NIP. 198409042010012009	- Kuasa PPKD/BUD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) - Pejabat yang menerbitkan dan menandatangani SP2D (Surat Perintah

					Pencairan Dana) - Menyiapkan Anggaran Kas. - Menerbitkan SP2B Dana JKN Dan Dana BOS
				LANI JAELANI, SE, MM NIP. 19760101 200902 1 006	- Pejabat yang dan menandatangani SP2D Belanja selain gaji (BarangJasa/Belanja Modal), apabila Kuasa BUD Berhalangan/tidak hadir - Admin IBC
				HANNY ASMARAWATI NIP. 19781229 200701 2 005	- Pejabat yang dan menandatangani SP2D Belanja Pegawai, Gaji, TPP, Bansos dan Hibah, apabila Kuasa BUD Berhalangan/tidak hadir
				ATI PRATINI NIP. 19780405 200502 2 006	- Pejabat penandatangan pengantar SP2D ke Bank Persepsi - Bendahara Penerimaan SKPKD
			-	BUDI CAHYADI, S.Kom NIP. 19781229 2010011 005	- User Approvel IBC
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	WIRDA LARASATI DEWI, SKM, MM NIP. 19820813 200902 2 002	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	BAYU AJI PRATAMA, S.IP, M.Si NIP. 19880211 200701 1 001	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - User Approvel IBC

5.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MAYA ISMAWATI, SE NIP : 198412252009022012	- User Approvel IBC	MAYA ISMAWATI, SE NIP : 198412252009022012	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - User Approvel IBC
6.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERJINAN TERPADU SATU PINTU	MERYANA FISTA S.STP NIP. 19950212 201708 2 001	- Bendahara Penerimaan	-	-
7	KECAMATAN WALANTAKA	RITA ROSITA NIP. 19720415 200701 2 012	- Bendahara Pengeluaran	HUDARI NIP. 19780126 201408 1 002	- Bendahara Pengeluaran

WALIKOTA SERANG,


SYAFRUDIN